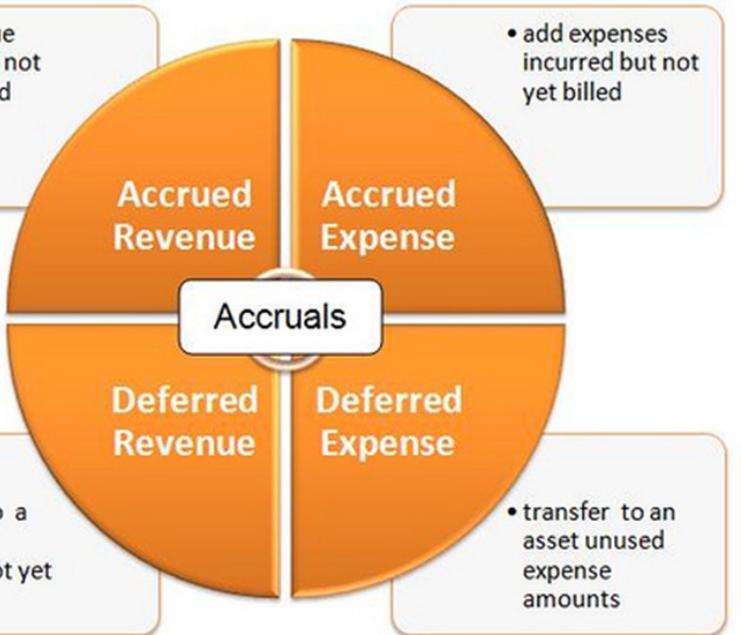


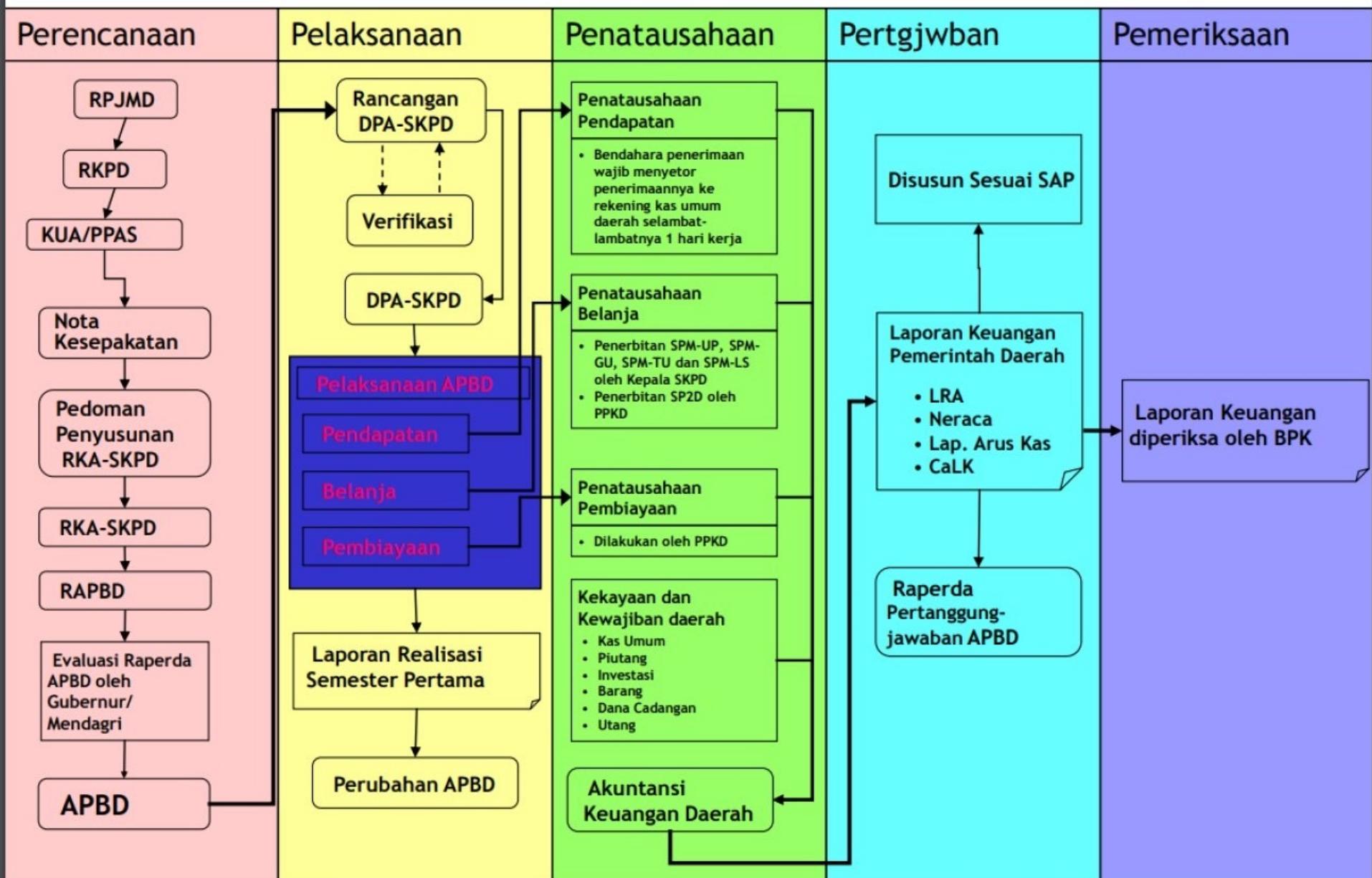
- add revenue earned but not yet invoiced



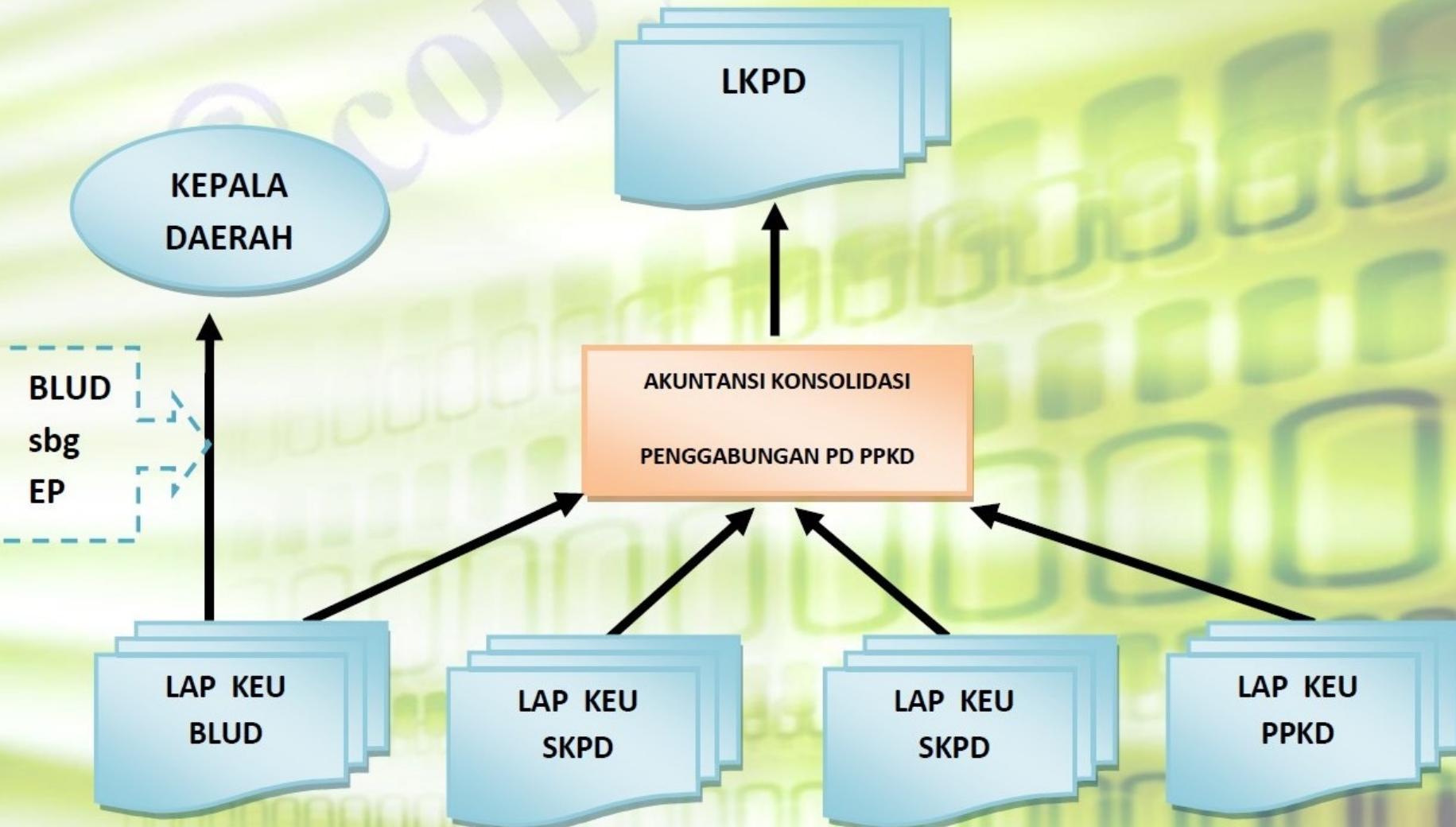
# LAPORAN KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAH DAERAH

Tri Andi Sukmanto, SE, M.Acc, CRGP, CRMP  
BPKP Kaltim

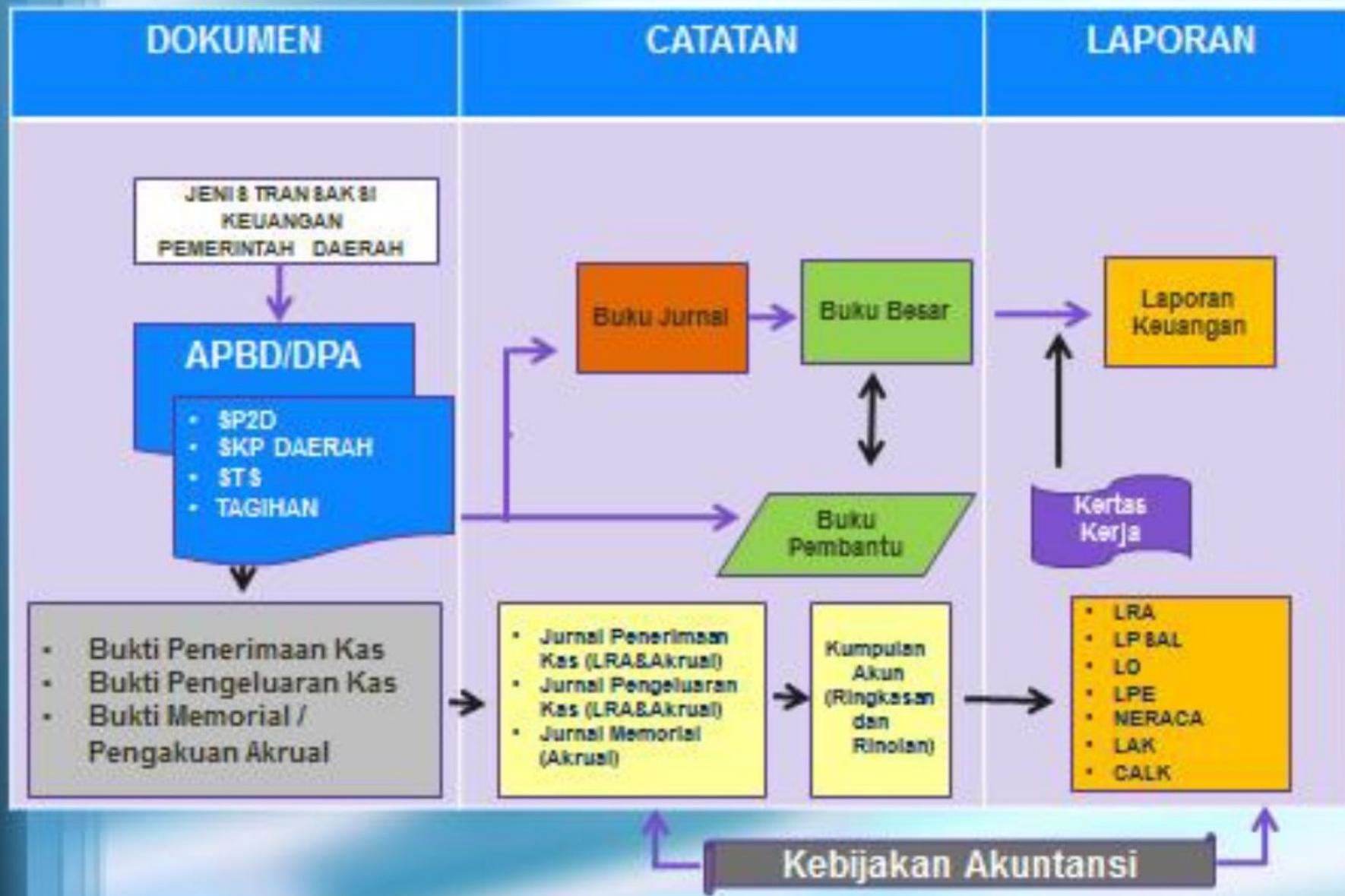
# Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah



## SKEMA PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH



# PROSES KEUANGAN POKOK



# A

# Akuntansi Pemerintah Daerah

## Ketentuan Umum



# KOMPONEN LK

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Operasional
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

# LAPORAN KEUANGAN POKOK

## Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Kelompok	Laporan Keuangan
<b>Laporan Pelaksanaan Anggaran</b>	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
<b>Laporan Finansial</b>	Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca Laporan Arus Kas (LAK)
<b>Catatan atas Laporan Keuangan</b>	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1-2)

- Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
- Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (*statutory*)

# STRUKTUR LRA (2-2)

- Pendapatan-LRA
- Belanja
- Transfer
- Surplus/defisit-LRA
- Pembiayaan
- Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

# LAPORAN PERUBAHAN SAL

- Melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA

# STRUKTUR LP SAL

- Saldo Anggaran Lebih awal;
- Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- Lain-lain



# NERACA

- Aset
- Kewajiban
- Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)

Ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional atau selisih antara pendapatan dan beban akrual

# LAPORAN OPERASIONAL

- Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
- Beban dari kegiatan operasional
- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada
- Pos luar biasa, bila ada
- Surplus/defisit-LO

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana

# HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Pelaksanaan Anggaran :

- SAL/SiLPA (tahun berjalan) pada LRA akan dimasukkan ke dalam LPSAL untuk menambah saldo SAL/SiLPA (awal)

# Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

NO	Akun	Anggaran	Realisasi
I.	Pendapatan-LRA	140	160
II.	Belanja	(100)	(90)
III.	Transfer	(15)	(15)
IV.	<b>Surplus/Defisit (I - II - III)</b>	<b>25</b>	<b>55</b>
V.	Penerimaan Pembiayaan	15	15
VI.	Pengeluaran Pembiayaan	(40)	(35)
VII.	<b>Pembiayaan Netto (V - VI)</b>	<b>(25)</b>	<b>(20)</b>
VIII.	<b>SAL/SiLPA (Tahun Berjalan) (IV + VII)</b>	<b>0</b>	<b>35</b>

## Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

I.	<b>SAL/SiLPA (Awal)</b>	10
II.	Penggunaan SAL/SiLPA (Tahun Sebelumnya) (sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan)	(10)
III.	<b>SAL/SiLPA (Tahun Berjalan)</b>	<b>35</b>
IV	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	1
V	Lain-lain	0
IV.	<b>SAL/SiLPA (Akhir) (I - II + III + IV+V)</b>	<b>36</b>

# HUBUNGAN ANTAR KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN



## Laporan Finansial :

- Saldo Surplus/Defisit pada LO akan menambah/mengurangi saldo Ekuitas pada LPE
- Saldo akhir Ekuitas pada LPE akan terbawa ke Neraca

# Laporan Operasional

I.	Pendapatan - LO	145
II.	Beban	75
III.	<b>Surplus/Defisit Operasional (I - II)</b>	<b>70</b>
IV.	Kegiatan Non Operasional	20
V.	Pos Luar Biasa	(5)
VI.	<b>Surplus/Defisit - LO (III + IV + V)</b>	<b>85</b>

# Laporan Perubahan Ekuitas

I.	Ekuitas Awal	350
II.	Surplus/Defisit - LO	85
III.	<b>Ekuitas Akhir (I - II)</b>	<b>435</b>

# Neraca

I.	Aset	515
II.	Kewajiban dan Ekuitas	515
	1. Kewajiban	80
	2. Ekuitas	435

# HUBUNGAN ANTAR LAPORAN

- **Laporan Finansial:**

LO → Laporan Perubahan Ekuitas → Neraca

- **Laporan Pelaksanaan Anggaran:**

LRA → Laporan Perubahan SAL

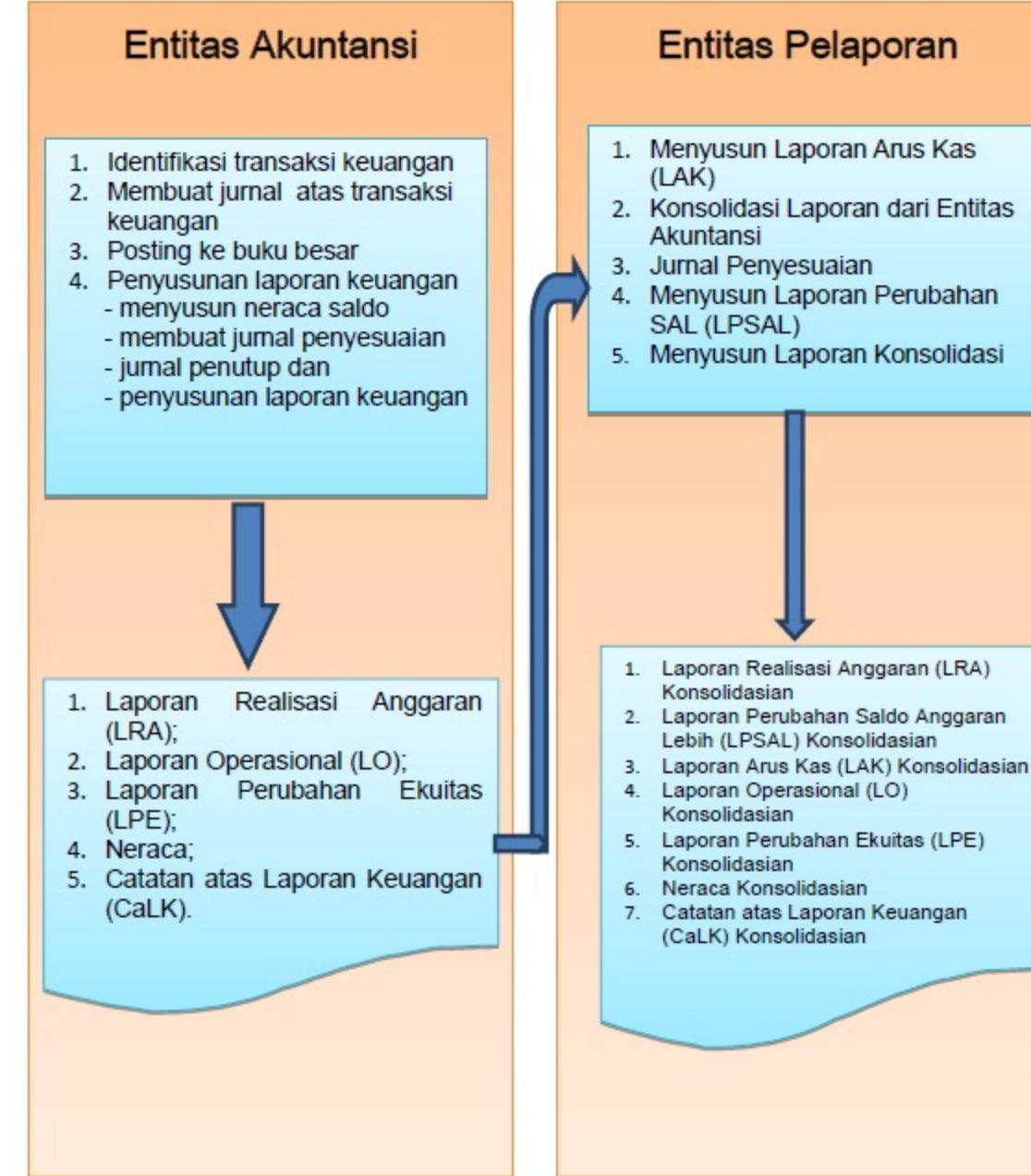
# PROSES AKUNTANSI & PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS AKUNTANSI

- 
1. Identifikasi transaksi keuangan
  2. Membuat jurnal atas transaksi keuangan
  3. Posting ke buku besar
  4. Menyusun Neraca Lajur:
    - Menyusun neraca saldo
    - Membuat jurnal penyesuaian
    - Membuat jurnal penutup
  5. Menyusun laporan keuangan

# PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA ENTITAS PELAPORAN

1. Penggabungan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (SKPD) : LRA, Neraca, LO, LPE, CaLK menjadi Laporan Keuangan Pemda
2. Penyusunan LPSAL dan LAK Pemda

Proses penggabungan LK SKPD dan penyusunan LPSAL & LAK pemda dilakukan oleh SKPKD



# METODE PENCATATAN

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual akan mengakomodasi baik basis akrual maupun basis kas dalam satu sistem.

Dilakukannya dua jenis penjurnalan sekaligus baik untuk LRA maupun LO saat penerimaan kas maupun pengeluaran kas.

Untuk mencegah duplikasi pencatatan akun Kas dalam Sistem Akuntansi Berbasis Akrual ini, akan dikenal akun baru yang dinamakan Perubahan SAL.

# BASIS AKUNTANSI PADA LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi	Laporan Keuangan
Akrual	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Operasional (LO)</li><li>- Neraca</li><li>- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)</li></ul>
Kas	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</li><li>- Laporan Perubahan SAL (LPSAL)</li><li>- Laporan Arus Kas (LAK)</li></ul>

# BASIS KAS

- Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
- Basis Kas diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan

# BASIS AKRUAL

- Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar
- Basis akrual diterapkan untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas

# PENDAPATAN-LO

- Tidak selalu berdasarkan penerimaan kas
- Penerbitan dokumen yang telah menimbulkan hak bagi pemerintah dipakai sebagai dasar untuk mengakui Pendapatan pada tahun berjalan dan pengakuan atas Piutangnya



# CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN OPERASIONAL

TRANSAKSI PENDAPATAN	AKRUAL - LO
1. Telah terbit Surat Ketetapan Pajak (SKP) di tahun 2009 sebesar Rp500	Dicatat sebagai pendapatan pajak pada periode dikeluarkannya SKP <b>Jurnal:</b> Piutang Pajak 500 Pendapatan Pajak 500
2. Pajak diterima oleh kas negara Rp300	Dicatat sebagai pelunasan piutang <b>Jurnal (BUN):</b> Kas 300 Piutang Pajak 300
3. Pada tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak Rp200	Tidak ada jurnal

# BEBAN

Tidak selalu berdasarkan pengeluaran kas tetapi juga diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa

# CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN OPERASIONAL

TRANSAKSI BEBAN	AKRUAL-LO
1. Satuan Kerja menerima tagihan listrik sebesar Rp200 pemakaian bulan Desember 20xx	Dicatat sebagai beban <b>Jurnal:</b> Beban langganan daya dan jasa 200 Utang Belanja 200
2. Pada tanggal 31 Desember 20xx belum dilakukan pembayaran tagihan listrik	Tidak ada jurnal

# JENIS JURNAL STANDAR

## 1. Jurnal Pembuka :

- Jurnal persediaan awal tahun dengan metode periodik

## 2. Jurnal Transaksi :

- Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/ Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya

## 3. Jurnal Penyesuaian

## 4. Jurnal Penutup

## 5. Jurnal Koreksi

# Akuntansi Pemerintah Daerah

Penjurnalan pada SKPD

## Jurnal Anggaran (LRA)

AKUN	DEBIT	KREDIT
Estimasi Pendapatan	XXX	
Estimasi Perubahan SAL	XXX	
Apropriasi Belanja		XXX

\*SAL = Saldo Anggaran Lebih

## Jurnal Pendapatan

Jurnal untuk mencatat pendapatan di Bendahara

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
Pendapatan Pajak - LO		XXX

JURNAL LRA	DEBIT	KREDIT
Estimasi Perubahan SAL	XXX	
Pendapatan Pajak - LRA		XXX

Jurnal untuk menyetor pendapatan ke PPKD (sebagai Bendahara Umum Daerah)

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
RK PPKD	XXX	
Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

\*RK PPKD = Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

# A

## Akuntansi Pemerintah Daerah

### Penjurnalana pada SKPD

#### Jurnal Beban dan Belanja

Jurnal atas Beban dan Belanja Pegawai – menggunakan mekanisme UP (Uang Persediaan).

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Beban Pegawai	XXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

JURNAL LRA	DEBIT	KREDIT
Belanja Pegawai	XXX	
Estimasi Perubahan SAL		XXX

\*Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka dari Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kepada bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (Revolving).

Jurnal atas Beban dan Belanja Pegawai – menggunakan mekanisme LS (pembayaran langsung)

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Beban Pegawai	XXX	
RK PPKD		XXX
JURNAL LRA	DEBIT	KREDIT
Belanja Pegawai	XXX	
Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jurnal Penggantian Uang Persediaan atas Beban dan Belanja

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
RK PPKD		XXX

# A

## Akuntansi Pemerintah Daerah

Penjurnalannya pada SKPD

### Jurnal Aset

Jurnal Belanja Modal dan Aset Tetap – menggunakan mekanisme UP

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Aset tetap (rincian objek)	XXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

JURNAL LRA	DEBIT	KREDIT
Belanja Modal Pengadaan (rincian objek)	XXX	
Estimasi Perubahan SAL		XXX

Jurnal Belanja Modal dan Aset Tetap – menggunakan mekanisme LS

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Aset Tetap (rincian objek)	XXX	
RK PPKD		XXX

JURNAL LRA	DEBIT	KREDIT
Belanja Modal Pengadaan (rincian objek)	XXX	
Estimasi Perubahan SAL		XXX

### Jurnal Kewajiban

Jurnal atas Utang Belanja (misal Biaya Listrik)

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Beban listrik	XXX	
Utang Belanja kepada Pihak Ketiga		XXX

Jurnal Utang Belanja atas pengadaan Aset Tetap (asset tetap telah diterima namun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS belum diterbitkan)

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Aset tetap (rincian objek)	XXX	
Utang Belanja kepada Pihak Ketiga		XXX

Jurnal Pembayaran atas Utang Belanja – menggunakan mekanisme UP dan LS

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Utang Belanja kepada Pihak Ketiga	XXX	
Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

JURNAL LRA	DEBIT	KREDIT
Utang Belanja kepada Pihak Ketiga	XXX	
RK PPKD		XXX

# Akuntansi Pemerintah Daerah

## Penjurnalana pada SKPD

### Jurnal Penyesuaian

#### Jurnal Penyesuaian atas penyusutan asset tetap

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Beban Penyusutan ...	XXX	
Akumulasi Penyusutan...		XXX

... dapat diisi sesuai dengan asset tetap nya.

#### Jurnal Penyesuaian atas pencatatan Persediaan – yakni dicatat sebesar hasil stock opname persediaan

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Persediaan Barang/Jasa (rincian objek)	XXX	
Beban Barang/Jasa		XXX

#### Jurnal Penyesuaian atas Beban dibayar di muka – misal beban sewa, menggunakan pendekatan asset

JURNAL LO	DEBIT	KREDIT
Beban Sewa	XXX	
Beban Sewa dibayar di muka		XXX

# JURNAL PEMBUKA

<b>1</b>	<b>Pengakuan persediaan di awal tahun dengan metode periodik</b>	<b>Beban Persediaan (Debet) Persediaan (Kredit)</b>
----------	--	---

# JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA

- Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas
- Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

# PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS



Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kas diterima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

Proses SKPD		
1	Penetapan	Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)
2	Pembayaran/Kas diterima Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Piutang (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
3a	Penyetoran oleh Bend. Penerimaan ke Kas Daerah	R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit)
Proses PPKD		
3b	Penyetoran oleh Bend. Penerimaan ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

Contoh: Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

## PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

Proses SKPD		
1	Penetapan	Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)
2a	Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah	R/K PPKD (Debet) Piutang (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Proses PKPD		
2b	Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

## PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

Proses PPKD		
1	Penetapan	Piutang (Debet) Pendapatan - LO (Kredit)
2a	Pembayaran Kas ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) Piutang (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

Contoh: Pendapatan DAU

# PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan

## PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PEMBAYARAN KAS DI SKPD

Proses SKPD		
1	Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2a	Penyetoran kas oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah	R/K PPKD (Debet) Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit)
Proses PPKD		
2b	Penyetoran kas oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi

## PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PEMBAYARAN KAS DI PPKD

Proses SKPD		
1a	Penetapan serta Pembayaran / Kas langsung ke Kas Daerah	R/K PPKD (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
Proses PPKD		
1b	Penetapan serta Pembayaran / Kas langsung ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

## PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DI PPKD

Proses PPKD		
1	Penetapan serta Pembayaran / Kas diterima Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)

Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman

# PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS



Kas telah diterima mendahului penetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan

## PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

Proses SKPD		
1	Pembayaran Kas diterima Bendahara Penerimaan	Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2a	Penyetoran Kas oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah	R/K PPKD Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit)
3	Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa	Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Proses PKPD		
2b	Penyetoran Kas oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

Contoh: Pajak Reklame

## PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS

### PENGAKUAN PENDAPATAN DI SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

Proses SKPD		
1a	Pembayaran Kas langsung ke Kas Daerah	R/K PPKD (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2	Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa	Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)
Proses PKPD		
1b	Pembayaran Kas langsung ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) R/K SKPD (Kredit)

## PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

Proses PPKD		
1	Pembayaran Kas langsung ke Kas Daerah	Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka (Kredit)
		Perubahan SAL (Debet) Pendapatan-LRA (Kredit)
2	Pengakuan pendapatan karena telah terjadi penyerahan barang/jasa	Pendapatan Diterima Dimuka (Debet) Pendapatan-LO (Kredit)

# JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA



- Beban diakui sebelum pengeluaran kas
- Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
- Beban diakui setelah pengeluaran kas

# BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS



Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan

## PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

Proses SKPD		
Kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU)		
1	Penetapan dan pengakuan beban	Beban ..... (Debet) Utang Beban (Kredit)
2	Pembayaran utang oleh Bendahara Pengeluaran	Utang Beban (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
		<b>Uang Muka (Debet)</b> Perubahan SAL (Kredit)
3a	Penerbitan SP2D GU oleh BUD	Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
		Belanja ..... (Debet) <b>Uang Muka (Kredit)</b>
Proses PKPD		
3b	Penerbitan SP2D GU oleh BUD	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

Contoh: Beban Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon)

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

## BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELOUARAN KAS

### PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Proses SKPD		
1	Penetapan dan pengakuan beban	Beban ..... (Debet) Utang Beban (Kredit)
2	Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS	Utang Beban (Debet) R/K PPKD (Kredit)
		Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD		
2c	Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

PENGAKUAN BEBAN DI PPKD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Proses PPKD		
1	Penetapan dan pengakuan beban	Beban ..... (Debet) Utang Beban (Kredit)
2	Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS	Utang Beban (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)
		Belanja (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

**Contoh: Beban Bantuan Sosial, Bantuan Hibah, Subsidi, Beban Bagi Hasil Pajak Provinsi, Beban Dana Otonomi Khusus Provinsi, Beban Bunga Utang**

# BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS



Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas

## BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

### PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

Proses SKPD		
1	Penetapan dan pengakuan serta pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran	Uang Muka (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
2	Pengesahan pertanggungjawaban oleh PPK-SKPD	Beban ... (Debet) Uang Muka (Kredit)
3a	Penerbitan SP2D GU oleh BUD	Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
		Belanja ..... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses di PPKD		
3b	Pengeluaran kas oleh BUD	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

**Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan  
Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan**

## BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

### PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Proses SKPD		
1a	Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD	Beban ..... (Debet) R/K PPKD (Kredit)
		Belanja ..... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD		
1b	Penerbitan SP2D-LS oleh BUD	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

## BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

### DIKELUARKAN MELALUI PPTK

Proses SKPD		
1	Kas dikeluarkan Bendahara Pengeluaran ke PPTK	Panjar Kegiatan (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
2	Pertanggungjawaban PPTK ke Bendahara Pengeluaran, pengembalian sisa panjar	Uang Muka (Debet) Panjar Kegiatan (Kredit) Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) Panjar Kegiatan (Kredit)
3	Pengesahan pertanggungjawaban oleh PPK-SKPD	Beban ..... (Debet) Uang muka (Kredit)
4a	Penerbitan SP2D GU oleh BUD	Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
		Belanja ..... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
Proses PKPD		
4c	Penerbitan SP2D oleh BUD	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

# BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS



Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.

## PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

Proses SKPD		
1	Pengeluaran kas oleh Bendahara Pengeluaran	Beban Dibayar Dimuka (Debet) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)
		Uang Muka (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
2	Penetapan dan pengakuan	Beban ..... (Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit)
3a	Penerbitan SP2D GU oleh BUD	Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet) R/K PPKD (Kredit)
		Belanja ..... (Debet) Uang Muka (Kredit)
Proses PPKD		
3b	Penerbitan SP2D GU oleh BUD	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

## PENGAKUAN BEBAN DI SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

<b>Proses SKPD</b>		
1	Penerbitan SP2D-LS oleh BUD	Beban Dibayar Dimuka (Debet) R/K PPKD (Kredit)
2	Penetapan dan pengakuan	Beban .....(Debet) Beban Dibayar Dimuka (Kredit)
3a	Penerbitan SP2D-LS oleh BUD	Belanja ..... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)
<b>Proses PKPD</b>		
3b	Penerbitan SP2D-LS oleh BUD	R/K SKPD (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

## PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1	<b>Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya</b>	<b>Perubahan SAL</b>
		<b>Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya</b>
2	<b>Penerimaan Pinjaman</b>	<b>Kas di Kas Daerah (Debet)</b> <b>Utang ..... (Kredit)</b>
		<b>Perubahan SAL (Debet)</b> <b>Pinjaman Dalam Negeri dari..... (Kredit)</b>
3	<b>Penjualan Obligasi Pemerintah</b>	<b>Kas di Kas Daerah (Debet)</b> <b>Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit)</b>
		<b>Perubahan SAL (Debet)</b> <b>Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)</b>

## PENERIMAAN PEMBIAYAAN

4	<b>Hasil privatisasi perusahaan daerah</b>	Jika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntungan
		<b>Kas di Kas Daerah(Debet)</b>
		<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)</b>
		<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit)</b>
		<b>Perubahan SAL (Debet)</b>
		<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)</b>
		Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian
		<b>Kas di Kas Daerah(Debet)</b>
		<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet)</b>
		<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)</b>
		<b>Perubahan SAL (Debet)</b>
		<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)</b>

## PENERIMAAN PEMBIAYAAN

5	Penerimaan pinjaman diberikan pihak ketiga	kembali yang kepada	<b>Kas di Kas Daerah (Debet)</b> Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Kredit)
			<b>Perubahan SAL (Debet)</b> Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit)
6	Pengumuman BUMD penerimaan berupa kas	laba dan deviden	<b>Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas)</b>
			<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet)</b> Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO (Kredit)
			<b>Pembayaran Deviden</b>
			<b>Kas di Kas Daerah (Debet)</b> Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)
			<b>Perubahan SAL (Debet)</b> Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA (Kredit)
7	Pencairan Cadangan	Dana	<b>Kas di Kas Daerah (Debet)</b> Dana Cadangan (Kredit)
			<b>Perubahan SAL (Debet)</b> Pencairan Dana Cadangan (Kredit)

## PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1	<b>Pemberian pinjaman kepada pihak ketiga</b>	<b>Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet)</b> <b>Kas di Kas Daerah (Kredit)</b>
		<b>Pemberian Pinjaman Daerah kepada..... (Debet)</b> <b>Perubahan SAL (Kredit)</b>
2	<b>Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet)</b> <b>Kas Di Kas Daerah (Kredit)</b>
		<b>Penyertaan Modal pada BUMD (Debet)</b> <b>Perubahan SAL (Kredit)</b>
3	<b>Pembayaran kembali pokok pinjaman</b>	<b>Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet)</b> <b>Kas di Kas Daerah (Kredit)</b>
		<b>Pembayaran Pokok Pinjaman kepada..... - LRA (Debet)</b> <b>Perubahan SAL (Kredit)</b>
4	<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>	<b>Dana Cadangan (Debet)</b> <b>Kas di Kas Daerah (Kredit)</b>
		<b>Pembentukan Dana Cadangan (Debet)</b> <b>Perubahan SAL(Kredit)</b>

## PEMBELIAN ASET TETAP

<b>Pembelian aset melalui Bendahara Pengeluaran dengan Uang Persediaan</b>		
1	<b>Saat pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran</b>	<b>Aset Tetap (Debet)</b> <b>Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)</b>
		<b>Uang Muka (Debet)</b> <b>Perubahan SAL (Kredit)</b>
2	<b>Saat pencairan SP2D GU di SKPD</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan .....(Debet)</b> <b>Uang Muka (Kredit)</b>
<b>Perolehan aset melalui mekanisme SPM - LS</b>		
3	<b>Jurnal di SKPD</b>	<b>Aset Tetap (Debet)</b> <b>R/K PPKD (Kredit)</b>
		<b>Belanja Modal Pengadaan ..... (Debet)</b> <b>Perubahan SAL (Kredit)</b>
4	<b>Jurnal di PPKD</b>	<b>R/K SKPD (Debet)</b> <b>Kas Di Kas Daerah (Kredit)</b> <b>Utang PFK (Kredit)</b>

	<b>Saat belum selesai 100%</b>	
1	<b>Jurnal di SKPD</b>	<b>Konstruksi Dalam Penggerjaan (Debet)</b> <b>R/K PPKD (Kredit)</b>
		<b>Belanja Modal Pengadaan ..... (Debet)</b> <b>Perubahan SAL (Kredit)</b>
2	<b>Jurnal di PPKD</b>	<b>R/K SKPD (Debet)</b> <b>Kas Di Kas Daerah (Kredit)</b> <b>Utang PFK (Kredit)</b>
	<b>Saat selesai 100% dan dibuat BAST</b>	
3	<b>Jurnal di SKPD</b>	<b>Aset Tetap (Debet)</b> <b>Konstruksi Dalam Penggerjaan (Kredit)</b>

**Pemberian uang muka kerja kepada rekanan dimasukan dalam KDP**



## **PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP**

1	<b>Aset Tetap (Debet)</b>
---	---------------------------

**Pendapatan Hibah dari .....-LO (Kredit)**

## **PENERIMAAN BUNGA DEPOSITO DANA CADANGAN**

1	<b>Dana Cadangan (Debet)</b>
---	------------------------------

**Pendapatan Bunga - LO (Kredit)**

# JURNAL STANDAR PENYESUAIAN AKHIR TAHUN

1	Pengakuan persediaan berdasarkan hasil <i>stock opname</i> (dengan metode periodik)	<b>Persediaan (Debet)</b> <b>Beban Persediaan (Kredit)</b>
2	Penyusutan Aset Tetap	<b>Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet)</b> <b>Akumulasi Penyusutan (Kredit)</b>
3	Penyisihan Piutang	<b>Beban Penyisihan Piutang (Debet)</b> <b>Penyisihan Piutang (Kredit)</b>

# JURNAL STANDAR PENUTUP

## JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal untuk menutup akun-akun LO

## JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal untuk menutup akun-akun LRA

Pendapatan .....	LO (1)	XXX
Pendapatan .....	LO (2)	XXX
Pendapatan .....	LO (3)	XXX
Beban .....	(1)	XXX
Beban .....	(2)	XXX
Beban .....	(3)	XXX
Surplus/Defisit-LO		XXX

Surplus/Defisit-LO	XXX
Ekuitas	XXX

Pendapatan .....	LRA	XXX
Belanja		XXX
Transfer		XXX
Surplus/Defisit-LRA		XXX

Penerimaan Pembiayaan	XXX
Pengeluaran Pembiayaan	XXX
Pembiayaan Netto	XXX

Surplus/Defisit-LRA	XXX
Pembiayaan Netto	XXX
SiLPA/SiKPA	XXX

SiLPA	XXX
Perubahan SAL	XXX

# KOREKSI KESALAHAN YANG MUNGKIN TIMBUL

- Keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran
- Kesalahan perhitungan matematis
- Kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi
- Kesalahan interpretasi fakta
- Kecurangan
- Kelalaian

# KESALAHAN DARI SIFAT KEJADIAN

- **KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK**  
(Contoh : Kelebihan/ Kekurangan Pembayaran Pajak) ---  
**mengoreksi pendapatan pajak saat kas masuk/keluar**
- **KESALAHAN YANG TIDAK BERULANG**
  - ❖ Pada periode Berjalan ---- **mengoreksi akun ybs**
  - ❖ Pada periode Sebelumnya
    - Sebelum LK diterbitkan --- **mengoreksi akun ybs**
    - Sesudah LK diterbitkan



# TERIMA KASIH

KEEP  
CALM  
IT'S  
JUST  
ACCOUNTING



DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH